

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis melalui pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian disertasi ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat kelemahan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam sistem *self assessment* adalah keterbatasan data dan informasi dari wajib pajak, maka *ratio legis* pengampunan pajak lebih tepat berorientasi pada keterbukaan dibandingkan dengan penerimaan pajak. Dengan demikian, kebijakan pengampunan pajak dapat dijadikan momentum oleh pemerintah untuk mengevaluasi sistem administrasi perpajakan yang ada ke arah lebih efektif dan efisien di masa mendatang.
2. *Ratio legis* UU Pengampunan Pajak dengan prioritas utama penerimaan pajak berdampak pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yang bermasalah dari segi formil pemilihan upaya hukum dan dari segi materi perkara. Banyaknya konflik hukum dalam UU Pengampunan Pajak dan undang-undang perpajakan lainnya, mengakibatkan kebutuhan akan Hakim Pengadilan Pajak yang berintegritas dan memiliki kompetensi pengetahuan hukum serta perpajakan yang memadai semakin penting.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pasca diperolehnya basis data, pemerintah perlu mempersiapkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan agar di masa mendatang tidak ada lagi wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi terhadap undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang PPh.
2. Perlunya reformasi di Pengadilan Pajak melalui pembaharuan UU Pengadilan Pajak untuk mengoptimalkan kinerja hakim. Kedudukan Pengadilan Pajak harus dapat berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga eksekutif. Lebih lanjut, perlunya Pengadilan Pajak untuk merekrut hakim dengan kompetensi hukum memadai dan berintegritas melalui proses seleksi hakim karier, sehingga diharapkan pada masa mendatang setiap putusan Pengadilan Pajak dihasilkan melalui pertimbangan dan penalaran hukum hakim yang mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku/Literatur:

- Algra, N.E., et.al, *Mula Hukum*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Andre Ata, Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Asmara, Galang, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Asran, A. Muhammad., *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress, Jakarta, 2012.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997.
- Brooke, Heather, *Your Right to Know*, Pluto P Press, London, 2004.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Redaksi Refika, Bandung, 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Cardozo, Benjamin N., *The Nature Of The Judicial Process*, Yale University Press, New Haven and London, 1991.
- Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Fuadi, Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.

- Girsang, Juniver, *Dibutuuhkan Wadah Organisasi Tax Lawyers Untuk Membantu Penyelesaian Kasus-Kasus Sengketa Pajak*, Perhimpunan Penasehat Hukum Pajak, Jakarta, 2009.
- Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Hudjon, Philipus M., *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hudjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
- Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Kurniawan, Mahendra, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Cet. Ke 1, Yogyakarta, 2007.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Magnus, Richard, "Transparent, Fair, and Impartial: A Snapshot of Tribunals in Singapore," *Internet, dapat A Snapshot of Tribunals in Singapore*," *Internet*, Diakses tanggal 20 November 2019.
- Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.

- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Suparman, *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.
- McCoubrey, Hilaire, Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Edisi ke 2, Blackstone Press Limited, London, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-7 Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Montesquieu, *The Spirit of The Law*, translated by Thomas Nugent, (Newyork: Hafner Press, 1949), hlm. 151. sebagaimana dalam Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Morrison, Wayne, *Jurisprudence – From The Greeks To Post Modernity*, Cavendish Publishing, Inggris, 1996.
- Muchsin, “*Kekuasaan Kehakiman Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 290 Januari 2010, Mahkamah Agung, Jakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Otto, Jan Michiel, terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, cetakan ke-10, Bandung, 1981.
- Rahardjo, Sajipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

- Rapat Ketua Hakim di Peace Palace, The Hauge, *The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity*, 25-26 November 2002.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ritonga, Anshari, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka El Mana, 2017.
- S., M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Sampara, Said, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Rochmat, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1964.
- Sumaryono, E., *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Supandi, *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Taib, Mukhlis, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

- Tax Court of Canada, [http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci\\_Eng/Index](http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Eng/Index), Diakses tanggal 20 November 2019.
- Tjitrosoedibio, R, Subekti, R., *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1971.
- Tobing, Ganda C., Indah Kurnia, dan Cindy Miranti, *Menilik Transparansi di Pengadilan Pajak*, Inside Tax ed. 22, Agustus 2014.
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, The Dorsey Press, Amerika, 1977.
- Wadji, Farid, *Independensi dan Akuntabilitas Peradilan*, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.
- Wignyodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ikhtiar, Jakarta, 1983.
- Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

## **B. Disertasi:**

- Gunawan, Edy, *Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2017.
- Pandjaitan, Petrus Irwan, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Perumahan: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Dr. Suhardjo Mengenai Pidana Penjara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sukismo, Bernadus, *Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2001.
- Tiranda, Yeheskiel Minggu, *Hak Preferensi Negara Atas Utang Pajak Dalam Aturan Hukum di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- Yuliandari, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

## **C. Jurnal, Makalah, Artikel dan Internet:**

- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Mahakamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Arquilo, Melvin A., *A Case Survey of the 1970 Supreme Court*, Keputusan Hukum Politik.
- Asshiddiqie, Jimly. *Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*, Disampaikan dalam Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, Jakarta, 22 Oktober 2000.
- Azhari, Aidul Fitriadi, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No. 1.
- Darussalam, *Kembali ke Filosofi Pajak*, Inside Tax, Suara Pengamat, Edisi 18 (Edisi Khusus), Jakarta.
- \_\_\_\_\_, "Kedudukan Pengadilan Pajak di Berbagai Negara," <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=41&q=&hlm=2>, Diakses tanggal 1 Desember 2019.
- \_\_\_\_\_, *Usulan Pengaturan wajib Pajak Pasca Putusan MK*, <https://news.ddtc.co.id/usulan-pengaturan-kuasa-wajib-pajak-pasca-putusan-mk-12629>, Di akses tanggal 5 April 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM*, Tanggal 12 April 2016.
- \_\_\_\_\_, *Risalah Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Dengan KADIN, HIPMI, dan APINDO*, Tanggal 19 April 2016.
- \_\_\_\_\_, *Risalah Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Dengan Pakar Ekonomi dan Perpajakan*, Tanggal 20 April 2016.
- \_\_\_\_\_, *Risalah Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Dengan KPK, POLRI, PPATK dan Kejaksaan Agung*, Tanggal 26 April 2016.
- \_\_\_\_\_, *Risalah Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Dengan Direktur Utama BEI dan Forum Pajak Berkeadilan*, Tanggal 26 April 2016.
- \_\_\_\_\_, *Risalah Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, Tanggal 8 Juni 2016.

- Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2018*, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Economic Policy Forum, Singapore, *Southeast Asia's Economic Crisis, Implications For Tax Systems And Reform Strategies*, The National University of Singapore, Department of Economics, EPF:001, 18 Agustus 1998.
- Fatmala, Nenin Dewi, *Persepsi Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6 Nomor 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2017.
- Fios, Frederikus, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal Humaniora Vol. 3 No. 1, BINUS University, Jakarta, 2012.
- Hamilton, Honourable John P., *Judicial Independence and Impartiality: Old Principles, New Developments*, 13th South Pacific Judicial Conference Apia, Samoa - 28 June to 2 July 1999 [http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/supreme\\_court/ll\\_sc.nsf/pages/SCO\\_speech\\_hamilton\\_280699](http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/supreme_court/ll_sc.nsf/pages/SCO_speech_hamilton_280699), Di akses tanggal 10 April 2019.
- Hantoro, Novianto M., *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta, 2012.
- Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11 No 1, Jurusan Syari'ah STAIN, Purwokerto, 2014.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 3, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2012.
- Hukum Online, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>, Di akses Tanggal 9 Januari 2019.
- \_\_\_\_\_, *Bahasa Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>, Di akses Tanggal 4 April 2019.
- \_\_\_\_\_, *Putusan MK Disebut Tak Pengaruhi Syarat Menjadi Kuasa Wajib Pajak*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afabed515445/putusan->



*mk-disebut-tak-pengaruhi-syarat-menjadi-kuasa-wajib-pajak*, 15 Mei 2018, Di akses tanggal 3 Oktober 2018.

Indrawati, Sri Mulyani, *APBN Kita Kinerja dan Fakta*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Konferensi Pers Edisi Januari 2018 tanggal 2 Januari 2018.

Institute of Public Affairs, *Magna Carta Is It Part Of Your Life Today?*, IPA Foundations of Western Civilisation Program, Australia.

Ismail, Tjip, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Hakikat*, <https://kbbi.web.id/hakikat>, di akses tanggal 7 November 2018.

\_\_\_\_\_, *Arti Kata Rasio*, <https://kbbi.web.id/rasio>, di akses tanggal 28 November 2019.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Proses Pembentukan Undang-Undang*, [http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas\\_pengantar.html](http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html), Di akses tanggal 9 Januari 2019.

Kristiaji, B. Bawono, *diskusi publik "Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2014: Peta Jalan Melampaui Target"*, Hotel Atlet Century Park, Januari 2015.

Lotulung, Paulus E., *"Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum"*, makalah pada Seminar disampaikan Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Narang, A. Teras, *Good Governance dan Clean Government Dalam Implementasinya di Provinsi Kalimantan Tengah*, Seminar Nasional Pergeseran Paradigma Kepemerintahan dari Government ke Governance: Teori dan Praktek, Komap Fisipol UGM, Yogyakarta, 2007.

Ortax, Darussalam, *Kedudukan Pengadilan Pajak di Berbagai Negara*, <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=41&list=&q=&hlm=6>, di akses tanggal 3 Februari 2019.

Otto, Jan Michiel, Suzanne Stoter, Julia Arnsheidt and Wim Oosterveld, *Legislative Theory to Improve Law and Development Projects*, dalam Jurnal Regel Mat afl. 2004/4.

Punarbhawa, I. Gusti Agung Bagus, Ni Ketut Lely Aryani, *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat*

*Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2, Bali, 2013.

Redaksi DDTTC News, *Tax Amnesty Jilid II, Apa Perlu?*, [https://news.ddtc.co.id/tax-amnesty-jilid-ii-apa-perlu-16628?page\\_y=1855](https://news.ddtc.co.id/tax-amnesty-jilid-ii-apa-perlu-16628?page_y=1855), Di akses tanggal 17 Desember 2019.

Ridwansyah, Muhammad, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 2, Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, 2016.

SAFLII, "*Law Via The Internet Africa Conference*," <http://www.saflii.org/content/south-africa-index.18>. SAFLII, "*Law Via The Internet Africa Conference*," Internet, dapat diakses melalui <http://www.saflii.org/content/south-africa-index>. Diakses tanggal 20 November 2019.

Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan Penggunaannya*, <http://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, di akses tanggal 21 Juni 2018.

Sitorus, Binsar, *Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pajak Di Indonesia*, Yuridika, Vol. 28, No. 1, 2013.

Suhendro, Winarto, *Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, [www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/.../Berita%20Pajak%20REVISI.doc](http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/.../Berita%20Pajak%20REVISI.doc), Diakses pada 3 Desember 2019.

Taverne, Bernardus Maria, *Hukumonline.com, Bismar Siregar, Hakim Kontroversial yang Berhati Nurani*, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6\\_c/bismarsiregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6_c/bismarsiregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani), Diakses tanggal 15 Agustus 2019.

Tobing, Ganda C., Indah Kurnia, dan Cindy Miranti, *Menilik Transparansi di Pengadilan Pajak*, Inside Tax ed. 22, Agustus 2014.

Trisnayanti, Ida Ayu Ivon, I Ketut Jati, *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1, 2015.

Victoria, Agatha Olivia, *Katadata.co.id dengan judul "Rencana Tax Amnesty Jilid II Ditentang karena Perburuk Sistem Pajak"*, <https://katadata.co.id/berita/2019/08/03/rencana-tax-amnesty-jilid-ii-ditentang-karena-perburuk-sistem-pajak>, Di akses tanggal 17 Desember 2019.

Wadji, Farid, *Independensi dan Akuntabilitas Peradilan*, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.

Wijaya, Daya Negeri, *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 1 No. 2, Universitas Negeri Malang, 2016.

Yulistyowati, Efi, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amendemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Pengadilan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

\_\_\_\_\_, Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

\_\_\_\_\_, Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

\_\_\_\_\_, Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

\_\_\_\_\_, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

\_\_\_\_\_, Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PUU-XIV/2016.

\_\_\_\_\_, Nomor: 58/PUU-XIV/2016.

\_\_\_\_\_, Nomor: 59/PUU-XIV/2016.

\_\_\_\_\_, Nomor: 63/PUU-XIV/2016.

\_\_\_\_\_, Nomor: 004/PUU-II/2004.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: XXX/PP/2016.

Direktorat Jenderal Pajak, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak*, Jakarta, 2016.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.

#### **E. Wawancara :**

Pengadilan Pajak, *Jawaban atas Permohonan Wawancara untuk Penelitian Disertasi*, Nomor Surat: S-15/PP/2019, Tanggal 16 September 2019.

Wawancara dengan Tongam Renikson Silaban, tanggal 12 Maret 2019 di BPHN, Jakarta.

Wawancara dengan Darussalam, tanggal 18 Juni 2019 di DDTC, Jakarta.

Wawancara dengan Tjip Ismail, tanggal 20 Juni 2019 di Apartemen Semanggi Slipi, Jakarta.

Wawancara dengan Sigit Danang Joyo, tanggal 24 Juli 2019 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.